

DETERMINAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Achmad Badjuri¹, Jaeni², Sunarto³ Permata⁴ Yuditiyani⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank
email: ¹badjuri@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menguji dan menganalisis variabel independen yang terdiri dari pengaruh sumber daya manusia, diterapkannya SAKD, teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Metode mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner menggunakan skala likert 1-5. Objek dalam penelitian merupakan aparatur sipil negara (ASN) BPKAD Kota Semarang. Output penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Kata Kunci: *Sumber daya manusia, diterapkannya SAKD, teknologi informasi, sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah, kualitas pelaporan keuangan daerah.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap adanya laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai bentuk output adanya proses dan aktifitas ekonomi menjadi sangat penting bagi publik atas kepercayaan dana-dana yang dikelola oleh pemerintah. PP No. 24 Tahun 2005 mewajibkan pemerintah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah wajib mengikuti prinsip-prinsip dan disusun dengan mengikuti SAP.

Pemerintah daerah harus menjaga kualitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang aktifitas-aktifitas ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Proses dan output pelaporan keuangan daerah akan diuji oleh Badan Pemerintah Keuangan (BPK) sebagai auditor pemerintah. BPK akan melakukan pengujian diantaranya kepatuhan terkait proses pelaporan keuangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan daerah.

Temuan-temuan BPK dalam setiap pemeriksaan atas proses pelaporan dan laporan keuangan daerah wajib menjadi perhatian pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Dari informasi BPK masih banyak temuan-temuan yang menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya berkualitas. Secara khusus pada Pemkot Semarang pernah terjadi fenomena ketika simpanan deposito pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sebesar 22,7 Milyar ternyata fiktif. Aset daerah berupa dana deposito sebesar 22,7 Milyar dalam laporan keuangan ternyata hanya catatan saldo saja tanpa ada saldo secara riilnya. Dana tersebut tidak pernah ada dalam jalur transaksi di BTPN sehingga dana tersebut tidak pernah tersimpan pada bank tersebut. Berdasarkan hasil uji lab terhadap kertas bilyet deposito Pemkot Semarang pada BTPN tersebut ternyata palsu sehingga menimbulkan proses hukum dan pidana atas pejabat yang terkait dengan masalah tersebut..

Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah membutuhkan adanya sumber daya pendukung yang memadai untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sumber daya yang memungkinkan sangat mendukung antara lain; sumber daya manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Halim, 2014 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan output dari proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi pada suatu pemerintah daerah sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi. Sumber daya manusia pemerintah yang disebut aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bekerja sesuai prosedur kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dapat meningkatkan produktivitas ASN sehingga kualitas kerja yang dihasilkan semakin baik dan menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat dan akan memberikan nilai lebih bagi pemerintah. Kompetensi ASN dalam proses pelaporan keuangan daerah sangat dibutuhkan agar menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Penelitian Nurillah dan Muid (2014), Wibawa dkk (2017) dan Abidin dkk (2018) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah sedangkan Wijayanti dan Handayani (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu media yang mendukung kemudahan proses dalam pelaporan keuangan daerah. Sistem tersebut bersifat desentralisasi yang merupakan perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah (Bastian, 2006). Penelitian oleh Nurillah dan Muid (2014), Agustini (2016) dan Wibawa dkk (2017) menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan Latifah (2017) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saat ini teknologi informasi menjadi hal penting dalam era digital. Teknologi informasi menjadi sangat handal dan dibutuhkan dalam mendukung proses pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan proses pengolahan dan penyebaran data yang didapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi (Jurnali dan Supomo, 2002). Penelitian Nurillah dan Muid (2014), Agustini dkk (2016) dan Wibawa dkk (2017) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian Handayani (2015) menunjukkan hal yang sebaliknya bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern suatu entitas dibangun untuk tujuan mengamankan aset dan kualitas pelaporan. Pengendalian *intern* adalah proses oleh eksekutif (Kepala Daerah, Instansi atau Dinas, dan segenap personel), yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai dan mencapai tujuan : keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan efektivitas serta efisiensi operasi (Bastian, 2006). Wibawa (2017) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan Nurillah dan Muid (2014) dan Yuliani dan Agustini (2016) menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2006). Penelitian Yuliani dan Agustini (2016) dan Wibawa (2017) menunjukkan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian Latifah (2017) menemukan hal yang sebaliknya bahwa SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian tentang bagaimana pengaruh SDM, SAKD, teknologi informasi, SPI dan SAP terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada BPKAD Pemkot Semarang. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh SDM, SAKD, teknologi informasi, SPI dan SAP terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada BPKAD Pemkot Semarang.

2. TINJAUAN PUSTAKA.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) oleh Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan bahwa terdapat hubungan antara *agent* dan *principal*. Pada hubungan ini terdapat suatu kontrak antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*, masyarakat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pelayanan dan kegiatan publik yang kemudian dilanjutkan dengan pertanggungjawaban melalui proses pelaporan keuangan.

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan sebuah catatan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang merupakan output dari proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi pada suatu pemerintah daerah. Pelaporan atas LKPD juga sebagai informasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi organisasi. Sebagai bagian penting dalam organisasi maka pengelolaannya harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberi kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia sebagai pilar penyangga utama dan penggerak roda suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi yang akan dicapai

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sistem yang dibangun untuk mendukung kemudahan proses dalam pelaporan keuangan daerah. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan

informasi yang digunakan pada saat pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2004). Proses akuntansi berisi tentang suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas kegiatan suatu entitas untuk menghasilkan dan memberikan informasi, sehingga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Dengan adanya SAKD maka proses pelaporan keuangan daerah diharapkan menjadi lebih cepat dan berkualitas.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan keuangan menjadi sangat penting karena saat ini pengelola keuangan daerah dituntut untuk menggunakan sistem yang telah dibangun oleh pemerintah. Jaringan internet dan digital antar SKPD harus didukung oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, cara dan alat yang dikordinasikan organisasi untuk menjaga keamanan harta (*asset*), menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mengoptimalkan efisiensi operasional serta meningkatkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi (Mulyadi). SPI yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam proses pelaporan keuangan oleh entitas pemerintah harus dipahami sistem pengendalian intern yang telah dibuat sebagai kebijakan manajemen. Dengan pemahaman atas SPI yang baik diharapkan dapat menjaga kualitas pelaporan keuangan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Para pengelola keuangan daerah diwajibkan untuk mampu memahami dan menerapkan SAP untuk menunjukkan kualitas pelaporan keuangan daerah

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi organisasi. Sebagai bagian penting dalam organisasi maka pengelolaannya harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberi kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia perlu direncanakan dan dibangun secara baik oleh organisasi. Kompetensi ASN yang terlibat dalam pelaporan keuangan daerah sangat dibutuhkan dan akan sangat membantu dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

Penelitian Nurillah dan Muid (2014), Wibawa dkk (2017) dan Abidin dkk (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu media yang mendukung kemudahan proses dalam pelaporan keuangan daerah. SAKD yang dirancang dan dibangun oleh pemerintah daerah akan sangat mendukung proses pelaporan keuangan pemerintah daerah. SAKD yang ada akan menjaga kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian oleh Nurillah dan Muid (2014), Agustini (2016) dan Wibawa dkk (2017) menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H₂: Penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teknologi informasi saat ini menjadi sangat handal dan dibutuhkan dalam mendukung proses pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan proses pengolahan dan penyebaran data yang didapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat akan mendukung proses pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan daerah akan baik.

Penelitian Nurillah dan Muid (2014), Agustini dkk (2016) dan Wibawa dkk (2017) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern suatu entitas dibangun untuk tujuan mengamankan aset dan kualitas pelaporan. Pengendalian *intern* adalah proses oleh eksekutif (Kepala Daerah, Instansi atau Dinas, dan segenap personel), yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai dan mencapai tujuan : keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan efektivitas serta efisiensi operasi.

Penelitian Wibawa (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H₄: Pemahaman atas SPI berpengaruh positif terhadap Kualitas pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah menjadi pedoman bagi para pengelola keuangan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Standar Akuntansi Pemerintah sangat mendukung kualitas pelaporan keuangan daerah.

Penelitian Yuliani dan Agustini (2016) dan Wibawa (2017) menunjukkan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah :

H₅: SAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BPKAD Pemkot Semarang. Dalam penelitian ini objeknya secara spesifik pada bidang akuntansi yang berjumlah 55 orang dan mendapatkan respon dari 41 ASN. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu peneliti mengambil sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut adalah; (1) ASN bidang akuntansi dan (2) pengalaman berada di bidang akuntansi minimal 1 tahun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian validitas menggunakan analisis faktor. Hasil perhitungan uji validitas pada masing-masing variabel penelitian diketahui nilai KMO diatas 0,50 sehingga kecukupan sampel terpenuhi. Selain itu nilai component matrix masing-masing indikator yang membentuk variabel penelitian lebih dari 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa indikator tersebut semuanya valid.

Hasil pengujian reliabilitas variabel SDM, SAKD, teknologi informasi, SPI, penerapan SAP dan kualitas pelaporan keuangan daerah memiliki nilai *alpha cronbach* lebih dari 0,7 sehingga semua variabel independen dan dependen dianggap reliabel.

Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk menguji adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier

Persamaan	Adjusted R2	Uji F		Uji t			Keterangan
		F Hitung	Sig.	Beta	T	Sign	
Pengaruh SDM, SAKD, teknologi informasi, SPI dan SAP terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.	0,760	74,035	0.000				
Pengaruh sumber daya manusia (SDM) terhadap terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.				.046	.622	.008	H1 diterima
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap terhadap kualitas				.263	2.174	030	H2 diterima

pelaporan keuangan daerah.							
Pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.				.214	2.516	.012	H3 diterima
Pengaruh sistem pengendalian internal (SPI) terhadap terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.				.225	2.406	.016	H4 diterima
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.				.161	1.384	.005	H5 diterima

Berdasarkan analisis regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah adalah adanya sistem akuntansi keuangan daerah dengan koefisien regresi tertinggi sebesar 0,263; kemudian sistem pengendalian internal dengan koefisien regresi sebesar 0,225; teknologi informasi dengan koefisien regresi sebesar 0,214; standar akuntansi pemerintah dengan koefisien regresi sebesar 0,161; sumber daya manusia dengan koefisien regresi sebesar 0,046;

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model pada variabel bebas (X) dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y). Dari tabel 1 diperoleh angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,760. Hal ini berarti bahwa variabel SDM (X1), SAKD (X2), Teknologi Informasi (X3). SPI (X4) dan SAP (X5) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Y) memiliki kontribusi sebesar 76%. Sedangkan faktor faktor lain yang dapat menjelaskan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah memiliki kontribusinya sebesar 34%.

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen /terikat (Ghozali, 2011). Dari tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 74.035 dan nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0.05 hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan *fit* (baik).

Pengujian Hipotesis

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan sumber daya manusia sebesar 0,008<0,05, berarti hipotesis yang diajukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah *diterima*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SDM berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Semakin tinggi dan baik kompetensi SDM, maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan SAKD sebesar 0,030<0,05, berarti hipotesis yang diajukan yaitu penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah *diterima*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Semakin pengelola pelaporan keuangan daerah menerapkan dan memahami SAKD maka kualitas pelaporan keuangan daerah akan semakin baik.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan teknologi informasi sebesar 0,012<0,05, berarti hipotesis yang diajukan yaitu penerapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah *diterima*. Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Adanya dukungan dan penerapan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas pelaporannya.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan SPI sebesar 0,016 < 0,05 berarti hipotesis yang diajukan, penerapan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah *diterima*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Semakin diterapkannya dan dipatuhinya SPI dalam pelaporan keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan variabel SAP sebesar 0,005< 0,05, berarti hipotesis yang diajukan yaitu penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah *diterima*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketika pengelola pelaporan keuangan daerah mampu memahami dan menerapkan SAP dengan baik maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah..

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, Standar Akuntansi Keuangan Daerah, teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidn M.Khoirul, Junaidi, Afifudin. 2018. Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-JRA Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Malang*. Vo.7. No.10.
- [2] Adhi Daniel Kartika, Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*. Vol.5. No.3.
- [3] Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I* Vol. 24.
- [4] Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Boynton, William C. Johnson., Raymond N. and Kell, Walter G. 2001. *Modern Auditing*, Edisi Ketujuh, Jilid 2, Erlangga, Jakarta
- [6] Brown, P.A, H. Stock Morris, and Wark Wilder. 2007. Ethical Exemption and The AICPA Code Profesional Conduct: And Empirical Investigation of Auditor & Public Perception. *Journal Of Business Ethis* 71:h:39-71
- [7] De Angelo, L.E. 1981. *Auditor Independence, "Low Balling", And Disclosure Regulation*. *Journal Of Accounting And Economics* 3. Agustus. Page 113-127.
- [8] Deis, D.R. dan G.A. Groux. 1992. *Determinant Of Audit Quality In The Public Sector*. *The Accounting Review*. Juli. Page 462-479.
- [9] Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- [10] Ikhsan, Arfan dan Ishak, Muhammad. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat, Jakarta
- [11] Jurnal, Teddy & Bambang Supomo, 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas, Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No. 2.
- [12] Kesuma Desmaria Puji, Choriul Anwar, Darmansyah. 2017. Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika*. Vol.1. No.2.
- [13] Latifah Asyiyhatul. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul).
- [14] Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [15] Nordiawan, 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- [16] Nurillah As Syifa, Dul Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok).
- [17] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [18] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- [19] Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- [20] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
- [21] Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
- [22] Surastiani Dyah Puri, Bestari Dwi Handayani. 2015. Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol.7. No.2.
- [23] Uma, Sekaran. 2006. *Research Methods For Business (Metode Penelitian untuk Bisnis)*. Edisi empat buku 1. Salemba Empat.
- [24] Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- [25] Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- [26] Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- [27] Widari Liziana, Sutrisno. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. Vol.5. Edisi 10.
- [28] Wijayanti Ratna, Nur Handayani. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrua terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.6. No.3.
- [29] Yuliani Nur Laila, Rahmawati Dwi Agustini. 2016. Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol.14. No.1.